

## INDEKS SAHAM

21 Agustus 2017 | Sumber: IMQ  
(\*) Penutupan 18 Agustus 2017

IHSG	NIKKEI	HANG SENG	STI	KLCI	DOW JONES (*)	NASDAQ (*)
↓ 32.8 0.56%	↓ 77 0.40%	↑ 107 0.40%	↓ 5 0.15%	↓ 5 0.26%	↓ 76 0.35%	↓ 5 0.09%
5.861	19.393	27.155	3.247	1.772	21.674	6.217

## KURS TENGAH VALAS

	Jual	Beli
■ USD	13.356,00	13.340,00
■ SGD	9.799,52	9.779,52
■ HKD	1.720,91	1.690,91
■ GBP	17.233,55	17.133,55
■ EUR	15.719,89	15.619,89
■ JPY (100)	12.408	12.068

## Permintaan Hunian Vertikal dan Perkantoran Terus Turun

SURABAYA-Jumlah hunian vertikal dan perkantoran di Surabaya terus bertambah, namun justru permintaannya terus menurun. Hal itu disampaikan dalam paparan Surabaya Properti Market Report oleh Colliers International di Surabaya, Senin (21/8).

Senior Associate Director Research Colliers International, Ferry Salato mengatakan, okupansi hunian baik apartemen maupun perkantoran di Surabaya terus turun dari tahun ke tahun. "Pembangunannya terus meningkat, tapi okupansinya turun," kata Ferry.

Lebih lanjut dijelaskan dia, untuk okupansi hunian apartemen, misalnya, di tahun 2016, masih 65 persen, namun di pertengahan 2017 ini justru turun hampir 59 persen. Sedangkan, untuk okupansi perkantoran juga turun.

Menurut Ferry, untuk tingkat hunian apartemen terbesar masih berpusat di wilayah Surabaya Timur hingga mencapai 46 persen, sisanya berada di wilayah Surabaya Barat dengan persentase 44 persen. Sisanya, Surabaya Selatan dan Surabaya Pusat dengan masing-masing okupansi 7 persen dan 3 persen.

"Tahun 2017 ini ada tiga pengembang yang fokus menasar wilayah Surabaya Barat dan Timur, di Surabaya Barat ada CitraLand dengan Taman Emerald Apartemen dan Surabaya Timur dengan Arundaya dan ditargetkan tahun 2020 selesai," kata dia.

Ferry memaparkan, secara total okupansi perkantoran di Surabaya justru berjalan stangan. Di tahun 2016 lalu, tingkat hunian sudah mencapai 74 persen, kemudian di tahun 2017 ini sekitar 73 persen. Angka itu jauh dari tahun tahun sebelumnya yang



OKUPANSI: Salah satu hunian vertikal di Surabaya. Colliers International mengungkapkan permintaan hunian vertikal dari tahun ke tahun trennya cenderung turun.

tingkat huniannya mencapai 80 persen, dan tertinggi puncaknya pada tahun 2014 yang tingkat huniannya sampai 88 persen.

Di tengah menurunnya tingkat hunian vertikal baik apartemen maupun perkantoran, Ferry meng-

ungkap bila superblok atau hunian yang bergabung dengan pusat perbelanjaan justru terus berkembang. "Okupansi untuk Superblok tumbuh signifikan, di Pakuwon Mall, misalnya, permintaannya cukup tinggi. Bah-

kan okupansinya sudah mencapai 70 persen," kata Ferry.

Gaya hidup serta kemudahan fasilitas membuat hunian superblok akan terus diminati dan nilai propertinya akan terus meningkat. (han/hen)

## 40 Persen Rumah Subsidi Tak Layak Huni

Hasil Temuan PUPR, Ancam Blacklist Pengembang

JAKARTA-Pemerintah saat ini tengah mengevaluasi pelaksanaan program sejuta rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah terlaksana sejak April 2015 lalu. Pasalnya dari hasil pengamatan yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada sekitar 30-40 persen rumah bersubsidi yang tidak layak huni sehingga tidak dihuni oleh pembelinya.

Hal itu seperti diungkapkan Lana Winayanti, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, dalam sambutan pada acara sarasehan di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/8).

"Ada temuan, bahwa banyak rumah bersubsidi yang tidak dihuni, cukup besar memang, 30-40 persen," kata Lana.

Menurut dia, alasan penghuni rumah subsidi tidak menempati rumah yang dibelinya ketika di survey Kementerian PUPR, adalah rumahnya tidak layak untuk dihuni. "Terutama mengenai fasilitas rumah seperti listrik, jalan hingga air bersih," je-

## Hasil Monitoring Kementerian PUPR terhadap Rumah Bersubsidi

- Tidak layak huni mencapai 30-40 persen atau mencapai 150.000 hingga 200.000 unit rumah.
- Alasan tidak dihuni karena buruknya fasilitas rumah seperti listrik, jalan hingga air bersih.
- Sanksi blacklist siap diterapkan kepada pengembang yang bermain-main dengan rumah subsidi.
- Keluhan konsumen tidak digubris oleh pengembang.

lasnya.

Lana menjelaskan, angka 30-40 persen sendiri berasal dari total rumah subsidi yang telah disalurkan. Jika dihitung dari jumlah unit rumah subsidi yang telah disalurkan hingga saat ini sebanyak 504.079 unit, jumlah rumah subsidi yang tak dihuni oleh pemiliknya tersebut berarti mencapai 150.000 hingga 200.000 unit rumah.

Yang membuat geram lagi, lanjut Lana, adalah keluhan tersebut seringkali tidak digubris oleh pengembang. Padahal konsumen sudah sering menyampaikannya kepada pengembang.

Menyikapi hal itu, Lana menegaskan, pihaknya akan melakukan investigasi kepada para pengembang yang menggarap rumah subsidi. Jika terindikasi melakukan pelanggaran, pemerintah tidak

akan segan-segan menjatuhkan sanksi kepada pengembang yang bermain-main dengan rumah subsidi.

"Kita akan jatuhkan sanksi. Bisa saja nanti kita blacklist," tandasnya.

Lana melanjutkan, dalam upaya investigasi tersebut, pihaknya berencana membentuk tim evaluasi kualitas rumah bersubsidi tersebut. Tim evaluasi ini juga bertujuan untuk mengetahui pengembang mana saja yang membangun rumah subsidi dengan kualitas rendah.

Dia menambahkan, pemerintah juga akan meminta kepada para pengembang untuk wajib masuk ke dalam asosiasi. Karena itu, pihaknya akan bekerja sama dengan asosiasi bisa dengan mudah mendata dan memonitoring para pengembang-pengembang yang menggarap rumah subsidi itu. (oz/jpnn/hen)

## Layanan Data Video, Pasar Potensial Operator Seluler

SURABAYA-Penggunaan video dalam layanan data operator terus tumbuh dengan meningkatnya kebutuhan streaming di Indonesia. Hal itu mendorong operator seluler terus meningkatkan penggunaan data kepada konsumen sebagai ceruk pasar yang potensial.

VP Sales and Marketing Telkomsel Area Jawa Bali, Ericson Sibagariang mengatakan pertumbuhan penggunaan layanan data untuk seluruh video, baik youtube, streaming film, dan lainnya tumbuh 40 persen. Sedangkan, khusus video film sendiri tumbuh 4 persen.

"Anak anak sekarang semuanya melihat video, baik lewat youtube, maupun aplikasi lainnya. Satu bulan penggunaan video di rumah rumah bisa sampai 12 giga. Potensinya sangat besar," kata Ericson di Surabaya, Senin (21/8).



VIDEOMAKER: Ericson Sibagariang (kanan) menjelaskan Video Challenge dengan mahasiswa di Student Center Universitas Airlangga Surabaya, Senin (21/8).

Pengamat perfilman Indonesia, Joko Anwar mengatakan, potensi perfilman di Indonesia cukup besar. Pasalnya, dari 261 juta penduduk Indonesia, masih 30 juta orang saja yang menjadi penonton film di Indonesia. Ada sekitar 1.300 bioskop di Indonesia. Padahal, sudah banyak perusahaan perfilman maupun konten lokal

yang khusus menampilkan video-video anak bangsa. Bahkan, pertumbuhan film pendek di Indonesia masih 10,2 persen.

"Potensi film pendek ini cukup bagus, karena apa? Mereka tidak membutuhkan investor dengan jumlah banyak, tidak membutuhkan biaya banyak untuk sewa artis maupun alat," kata dia. (han/hen)

## BREAK Enjoy tapi Serious

TERLIHAT lebih energik dan semangat, Direktur Customer Banking CIMB Niaga Lani Darmawan punya trik sendiri supaya wajahnya tetap terlihat ramah dan happy.

"Pastinya hidup dibuat enjoy namun tetap serius dalam melakukan tindakan apapun," kata Lani.

Untuk menjaga fisik dan pemikirannya, Lani berpikir positif dan tetap rajin olahraga. Tiap pagi ia selalu membaca koran untuk update informasi seputar politik, perkembangan perbankan, dan fenomena terbaru.

"Teknologi itu berkembangnya super cepat, makanya kita harus awareness. Saya hampir selalu update medsos, namun tetap rajin olahraga," kata Lani.

Biasanya olahraga yang digemari adalah running di sekitar rumahnya. Namun, beberapa kali menyempatkan fitness bersama temannya. (han/hen)

Lani Darmawan



PERKUAT HUKUM: Dari kiri, Imron Mawardi, Pengasuh Ponpes Mahrusiyah Lirboyo Kediri Reza Achmad Zahid, Dewan Pakar PWNJ Jatim KH Ma'ruf Khozin saat seminar ekonomi Syariah 'PayTren Halal atau Haram' di Gedung Astranawa Surabaya, Senin (21/8).

## Paytren Perkuat Hukum Lewat Ekonomi Syariah

SURABAYA-Potensi FinTech (Teknologi Finansial) bidang syariah diyakini akan terus tumbuh bersamaan dengan perkembangan layanan digital lainnya. Oleh karena itu, perlu upaya penguatan hukum digital syariah supaya tidak ada keraguan masyarakat terhadap aplikasi ini.

Seperti halnya yang dilakukan oleh aplikasi PayTren. Setelah sempat dituding abal-abal, aplikasi yang digagas oleh ustaz Yusuf Mansyur ini kembali mencari member dengan sosialisasi hukum lewat ekonomi syariah.

Pengamat Perbankan Syariah Universitas Airlangga (Unair), Imron mawardi mengatakan, pemerintah sudah seharusnya memperkuat hukum FinTech Syariah secara umum. Pasalnya,

layanan berbasis digital lewat sistem syariah akan terus dicari oleh masyarakat.

"Banyak hukum untuk memperkuat FinTech atau bisnis digital program syariah ini. Mulai dari Permendag, POJK, MUI, dan lainnya," kata Imron saat acara seminar Ekonomi Syariah 'PayTren Halal atau Haram' di Gedung Astranawa Surabaya, Senin (21/8).

Akan tetapi, lanjut dia, terkadang masyarakat bahkan pemerintah sendiri belum memahami sehingga status hukum produk itu tidak jelas.

Padahal, sudah lebih dari 50 perusahaan yang menyediakan layanan ekonomi berbasis syariah, mulai dari perbankan, peer to peer, uang teman, dan lainnya. (han/hen)

INDONESIA KERJA BERSAMA

**NISSAN DATSUN**  
**SIDOARJO**  
**PROMO MERDEKA**

TRADE IN & TEST DRIVE

Kunjungi Pameran Kami di Lippo Mall dan Sun City Sidoarjo

Type tertinggi **Rp15.500.000**

**GO** Cicilan 70rbn/hari

All New Grand Livina

Harga mulai **Rp185.800.000**

**DP 27jt**

**BONUS\***

ELECTRIC MIRROR

FOG LAMP

**GRATIS JASA SERVIS BERKALA** s.d. 50.000 km atau 4 tahun

Ultimate in-car experience

For more info : 031 807 6979  
Jalan Jenggolo No. 12, Kel. Pecang, Kec. Sidoarjo

\*Syarat dan ketentuan berlaku